

# KERJA MAGANG: DARI JURUTULIS SAMPAI BUPATI DI HINDIA BELANDA MENJELANG ABAD XX

Oleh Drs. Sudarno, M.A

## PENDAHULUAN

Pada masa Kolonial, masyarakat di Hindia Belanda secara diskriminatif telah sengaja dikelompok-kelompokkan oleh pemerintah Kolonial Belanda ke dalam tiga lapisan masyarakat. Lapisan pertama adalah Orang *Eropa* (orang Belanda dan orang Eropa lainnya). Lapisan kedua adalah Orang *Timur Asing* (orang Cina, Jepang, Arab, India). Lapisan ketiga atau yang terakhir adalah Orang *Inlander*. Yang dimaksud Orang Inlander adalah penduduk (orang) Indonesia asli, yang mempunyai konotasi merendahkan orang Indonesia. Artinya orang Indonesia disejajarkan dengan orang yang terbelakang secara budaya atau sebagai oborigin. Ini merupakan suatu taktik pemerintah kolonial, yaitu mencetak atau menempatkan orang Indonesia menjadi kelas bawahan atau kelas pekerja di institusi swasta maupun pemerintah Pangreh Praja (Inlands Bestuur). Mereka tidak dicetak untuk mejadi kelas elite (*priyayi*) dan calon pemimpin.

Kecuali para anak pejabat atau kepala daerah (*De Inlandse Hoofden*: seperti Asisten Wedana, Wedana, dan Bupati) yang berasal dari aristokrasi lama (kaom ningrat) atau priyayi birokrasi. Mereka tetap dipertahankan oleh pemerintah kolonial sebagai kelompok yang memiliki hak istimewa untuk mewarisi atau menduduki jabatan-jabatan kepala daerah dan hak-hak istimewa lainnya yaitu dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan. Itulah sebabnya, sisten pemerintahan feodal masih berkembang secara subur di Hindia Belanda sampai akhir pemerintahan kolonial Belanda – walaupun bentuk pemerintahan liberal telah diprogramkannya sejak awal abad XIX.

Kenyataan ini membuktikan bahwa pemerintah kolonial secara sistematis telah menciptakan kesenjangan sosial yang cukup lebar antara wong cilik dan wong priyayi. Sebagai dampak selanjutnya adalah munculnya pembatasan-pembatasan kepada orang-orang yang bukan berasal dari kelas priyayi di berbagai bidang – baik di bidang pendidikan dan pekerjaan. Di bidang pendidikan, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat masuk sekolah Eropa dan dapat mengajukan promosi jabatan sebagai kepala daerah.

Ketika pemerintah kolonial Belanda berkuasa Hindia Belanda sejak pertengahan kedua abad XIX, penduduk Pribumi menjadi pegawai atau bekerja sebagai pejabat daerah di lingkungan instansi-instansi pemerintah Pangreh Praja (*Inlands Bestuur*) adalah amat sangat sulit. Ada aturan-aturan yang membatasi penduduk pribumi untuk menjadi pegawai negeri. Tidak sembarang orang atau setiap penduduk pribumi dapat dengan mudah menjadi pegawai pemerintah, khususnya untuk menjadi pejabat kepala daerah (*Inlands Hoofden*), seperti misalnya asisten Wedana, Wedana, dan Bupati.

Untuk menjadi pejabat di lingkungan administrasi pemerintahan Pangreh Praja, seorang pribumi harus melalui proses kerja *magang* terlebih dahulu. Kerja magang adalah suatu pekerjaan yang paling rendah, yaitu pekerjaan juru tulis, di dalam struktur kepegawaian pada waktu itu.

Di dalam artikel ini muncul pertanyaan: Apa sistem kerja magang itu? Mengapa pemerintah kolonial menjalankan kebijakan sistem kerja magang? Siapa saja yang harus mengikuti kerja magang di lingkungan lembaga Pangreh Praja (*Inlands Bestuur*), dan bagaimana pelaksanaan kerja magang itu?

## METODOLOGI

Artikel ini akan merekonstruksi suatu peristiwa sejarah yang telah terjadi di masa lampau, yang terjadi hanya sekali, dan tidak mungkin dapat diulang kembali, dan tidak dapat diamati secara langsung, (Gottschalk, 1975), yaitu kerja magang dari juru tulis sampai bupati di Hindia Belanda pada masa kolonial. Suatu fenomena sejarah yang unik. Ini terjadi hanya pada orang pribumi saja.

Masalah ini merupakan studi pendahuluan yang masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Oleh karena sumber-sumber yang digunakan dalam artikel ini masih sangat terbatas, yaitu literatur dan artikel yang ditulis oleh pejabat kolonial di majalah - yang dipublikasikan pada majalah-majalah yang terbit pada masa kolonial. Sudah barang tentu artikel ini masih jauh dari sempurna.

Alat analisis yang digunakan di dalam artikel ini adalah analisis deskriptif (Renier, 1967). Tujuannya yaitu untuk memaparkan kembali kejadian atau peristiwa sejarah ke dalam suatu kisah sejarah yang utuh, yang tidak dipungkiri masih jauh dari bagaimana yang sesungguhnya terjadi (*wie es eigenlicht geweest*) seperti yang disampaikan oleh seorang sejarawan terkenal Leopold von Ranke (Thomson, 1969).

## LATARBELAKANG KERJA MAGANG

Pada akhir abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda membatasi wewenang dan kekuasaan para pejabat-pejabat (pangreh praja) yang berasal dari kelompok pribumi. Sedikit demi sedikit hak-hak istimewa mereka dikurangi. Mereka tidak lagi memiliki wewenang dan kekuasaan seperti ketika di bawah kekuasaan raja, yaitu sebagai "raja kecil" di luar keraton dengan memiliki wilayah dan segala hak-hak istimewanya (upeti, pancen, memiliki prajurit, dan lain-lainnya). Sebaliknya mereka dijadikan oleh pemerintah kolonial sebagai apa yang disebut pegawai.

Namun demikian jabatan itu masih sebagai jabatan yang pretisius. Untuk sampai kepada jabatan pimpinan, seperti camat, wedana dan bupati, seseorang harus menjalani magang: suatu perjuangan yang cukup berat dan lama. Itu tergantung kepada atasannya. Proses ini untuk menguji kesetiaan seseorang pegawai, agar jika kelak menjadi pimpinan supaya memiliki loyalitas yang tinggi kepada pemerintah.

## PEMBAHASAN

Sebelum pemerintah kolonial Belanda menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara, golongan penguasa-penguasa Jawa , khususnya Kasunanan surakarta dan Kasultanan Yogyakarta (*Vorstenlandern*) dapat menghimpun secara mantap kekuasaannya dari sumber-sumber militer, perdagangan, tanah, dan agama secara bersama-sama atau terpisah (Scherer 1984: 29). Karena kebesaran mereka itu, kekuatan-kekuatan asing khususnya Belanda segan atau takut melakukan kerjasama di bidang politik. Mereka hanya memberi kesempatan kerjasama di bidang perdagangan. Itu hanya terbatas di tingkat istana. Amatlah sulit Belanda menembus kerjasamanya dengan kekuatan-kekuatan yang berada di bawah raja di darah pedalaman. Hal seperti ini merupakan sesuatu yang sangat sensitif. Raja khawatir apabila kekuasaannya yang telah dibangun melalui ikatan-ikatan feodal oleh penguasa sebelumnya direbut oleh Belanda.

Hubungan antara penguasa pusat (*center*) yaitu raja dengan penguasa di pinggiran (*periphery*) yaitu bupati telah berjalan dengan harmonis. Raja memberi kekuasaan dan wewenang (Parkin, 1982) kepada bupati untuk memerintah di wilayahnya secara otonom. Oleh karena itu dengan kekuasaan dan wewenang yang telah diberikan itu seringkali mengakibatkan munculnya kerajaan di dalam kerajaan, sehingga para bupati kekuasaan tak terbatas atas wilayahnya. Akibatnya pemberontakan atau pembangkanganpun tidak dapat dihindarkan. Untuk menghindari agar tidak terjadi pemberontakan atau pembangkangan dari penguasa-penguasa di daerah, maka raja mengangkat kepala daerah dari orang-orang yang dapat

dipercaya yang diikat dengan ikatan kekerabatan, perkawinan, dan ikatan primordial lainnya.

Kondisi seperti itu sedikit demi sedikit mulai memudar ketika penguasa-penguasa di Vorstenlanden itu berebut kekuasaan mencari hegemoni (*Babad Giyanti*). Di antara Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta saling ingin menjadi penguasa tunggal di Jawa (Ricklefs, 1991: 145-164). Ini kira-kira terjadi sejak awal pertengahan abad ke 18. Semenjak itulah Belanda mulai melancarkan strateginya untuk melakukan kerjasama politik (intervensi) yang tidak hanya terbatas ke tingkat istana tetapi ke daerah-daerah di pedalaman (pedesaan). Berbarengan dengan itu pula terjadi pengikisan kekuasaan penguasa di daerah (Bupati) yang dilakukan oleh Penguasa kolonial Belanda. Pada waktu diberlakukan cultuur stelsel (sistem perkebunan) tahun 1830, rasionalisasi pemerintahan, dominasi militer dan politik Belanda atas Jawa, menjadi suatu kenyataan (Furnivall 1944;115-147) bahwa basis-basis kekuatan tradisonal (bupati) digantikan oleh corak Belanda yang digunakan untuk memperkuat mereka sebagai penguasa.

Ketika diperkenalkannya sistem pertanian itu, diciptakan institusi baru yang dikenal sebagai *kontrollir* (pengawas) untuk mengawasi tingkat-tingkat pemerintahan Jawa yang lebih rendah (bupati). Semenjak itulah kekuasaan seorang bupati merosot sampai pada posisi yang paling rendah yang belum pernah dialami sebelumnya. Di masa kerajaan, penguasa daerah itu dikenal sebagai bupati dengan mengurus daerahnya sendiri, kemudian berubah menjadi *regent* menjadi bawahan langsung pemerintah kolonial Belanda di lingkungan administrasi Inlands Bestuur (Pangreh Praja) (Alkema, 1925: 211). Para bupati itu tidak lagi mendapat tanah apanage tetapi diberi gaji berupa uang oleh pemerintah Kolonial Belanda. Untuk memperoleh kesetiannya, mereka diberigelar-gelar kehormatan yang tinggi – yang biasanya diperuntukkan kepada para bangsawan tinggi kerajaan dan keturunan langsung dari raja – seperti *pangeran*, *adipati* atau *aria*. Regent Demak adalah contoh serong yang mendapat gelar pangeran dari Belanda (Djajahadikusumo, 1969: 47). Hal ini merupakan suatu kelihaihan pemerintah kolonial Belanda agar kekuasaannya ditingkat daerah masih mendapat

kepercayaan masyarakatnya karena masih menggunakan gelar-gelar feodalistis tersebut, walaupun wewenang dan kekuasaannya telah dibatasi dengan peraturan pemerintah, *Reggeering Reglement no. 69 tahun 1854*(*R.R. 69*)

Penduduk pribumi, yang bukan keturunan seorang aristokrat atau ningrat (bupati), sulit untuk menduduki jabatan bupati. Bupati adalah suatu jabatan tertinggi yang dapat nikmati oleh penduduk pribumiyang telah mendapat pendidikan barat. Kebanyakan penduduk pribumi hanya dapat menduduki jabatan pimpinan di lingkungan adminitrasi pemerintah di bawah jabatan bupati (regent) yang pada waktu itu digolongkan sebagai *priyayi*, (Scherer, 1985: 35, dan Geertz , 1983: ix, dan), seperti misalnya pegawai-pegawai di tingkat Kabupaten (Regentschap), Kecamatan (*Onderdistrick*) dan Kawedanan (*Districk*).

Untuk menjadi pegawai seperti tersebut diatas adalah sangat sulit, karena ada syarat-syarat berat dapat dilalui. Syarat-syarat itu antara lain adalah keturunan bangsawan atau aristokrat, pejabat atau kepala pribumi (*inlands hoofden*), kaya, loyal, berpendidikan. Syarat yang disebut terakhir ini yang umumnya harus dilalui dan dijalani oleh calon pegawai yang berasal dari pegawai rendahan, misalnya seorang (mantri) guru.

Magang adalah suatu pekerjaan yang harus dijalani dalam waktu yang tak terbatas bagi seseorang (penduduk pribumi) sebelum dipercaya menduduki jabatan-jabatan tinggi di lingkungan kerja Pangreh Praja (*Inlands bestuur*). Magang dapat dilakukan pada pejabat dari orang Pribumi maupun Belanda. Pemagang tidak hanya diberi pekerjaan administratif di kantor sebagai jurutulis (pegawai rendahan) namun juga pekerjaan di luar kedinasan, misalnya sebagai pembantu di rumah yang diikuti magang. Ini dengan maksud agar pemagang itu mengetahui sopan-santun, etika, dan perilaku seorang pejabat, di samping mengetahui urusan-urusan adminitratif. Walaupun sudah bertahun-tahun ikut magang tetapi tidak memiliki prestasi kerja yang menonjol, disiplin, dan tekun, pemagang itu belum akan dinyatakan lulus, maka selamanya akan hanya menjadi sorang pemagang

atau jurutulis saja. Kerja magang ini ada yang digaji ada yang tidak diberi gaji. Yang disebut terakhir ini biasanya adalah kerja magang yang dilakukan oleh priyayi di rumah keluarga pejabat tinggi (orang Pribumi atau Belanda). Oleh Sartono Kartodirdjo, ini disebut pekerjaan *nyantrik*, sedang Wertheim menyebutnya sebagai *magang-stelse* (Sartono Kartodirdjo, 1990 dan Wertheim, 1978).

Pada tahun 1915, Sewaka, seorang asisten wedana telah magang selama 12 tahun sebelum ia dapat dinaikkan ke dalam kedudukan wedana (scherer, op.cit.). Tirtokoesoemo adalah seorang anak dari Wedana Madiun yang sederhana, dengan bekal ijazah sekolah rendah dari *Lagere Inlandsche School* (Sekolah Rendah Pribumi) dan menguasai pengetahuan membaca, menulis (bahasa Jawa dan Melayu) dan berhitung, harus melewati masa magang sebelum mendapatkan pekerjaan dilingkungan pemerintahan mulai dari sebagai mantri polisi, patih, sampai dengan bupati. Pertama kali, ia bekerja magang di keluarga MR. Ph. (sic.) – seorang jaksa (*omgaand rechter*) berkebangsaan Belanda. Tidak lama kemudian, sebelum mendapatkan promosi sebagai pegawai kejaksaan, institusi omgaand rechter itu dihapus. Karena pengalaman magangnya itu ia diperkenankan menjadi siswa Sekolah Perkebunan (Landbouwschool) di Bogor pada tahun 1884 (Ph, 1934: 282-286)

Oleh karena kecakapannya ia dapat berbahasa bahasa Belanda dengan baik, sehingga diangkat Direktur sekolah Perkebunan itu yaitu Prof. DR. M. Treub sebagai asisten guru (*assistant-leeraar*) pada tahun 1887. Tidak lama kemudian ia dapat bekerja di lingkungan kerja Inlandsch Bestuur (Pangreh Praja) sebagai Mantri Polisi di Temanggung, Karesidenan Kedu. Tirtokoesoemo, semenjak itu, kariernya mulai menajak, sehingga pada tahun 1900 diangkat menjadi Patih (Wakil Bupati di Magelang, kemudian tahun 1993 diangkat menjadi Bupati di Kabupaten Karanganyar (di daerah Karesidenan Kedu) (Hoen, 1934: 282-285).

Nasib mujur yang dialami oleh Ahmad Djajadiningrat, seorang kemenakan dari Bupati Serang Karesidenan Banten. Dengan ijazah dari Sekolah

Menengah Atas Belanda (HBS) tahun 1898, ia bekerja magang hanya satu tahun lamanya sudah dapat diangkat menjadi asisten wedana. Dalam kedudukan yang belakangan, ia hanya bekerja magang satu tahun lamanya sebelum langsung dinaikkan menjadi seorang bupati. (A. Djajdiningrat, 1936: 260)

Overduijn menjelaskan bahwa di lingkungan administrasi pemerintah ada tiga golongan kerja: golongan A adalah kedudukan wedana dan bupati; golongan B adalah kedudukan mantri; dan golongan C adalah kedudukan magang. Tidak seorangpun yang dapat dinaikkan (*dibenoem*) pangkatnya ke dalam kedudukan tingkat A tanpa lebih dahulu bekerja pada tingkat C dan B (Overduijn, 1900: 12). Lama atau pendeknya waktu magang diukur juga dengan status sosial mereka. Untuk pemegang yang berasal dari golongan priyayi rendahan maka harus menjalani kerja magang yang cukup lama, sebaliknya untuk keluarga ningrat (bupati) dan berpendidikan Barat hanya menjalanni masa magang dalam waktu yang singkat.

Inilah yang kemudian hari mengakibatkan munculnya dua kelompok priyayi, yaitu kelompok priyayi tua (priyayi birokrasi) dan priyayi muda (priyayi profesional). Kelompok priyayi tua adalah kebanyakan para Bupati (para kepala daerah) yang mempertahankan budaya lama, sedang kelompok priyayi muda suka meniru budaya modern. Kelompok terakhir ini nantinya melahirkan cendekiawan-cendekiawan yang menjadi pemimpin-pemimpin pergerakan nasional yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, seperti M. Hatta, Sukarno, Akhmad subardjo, Rajiman Widyodiningrat, dan lain-lain.

Proses kegiatan kerja magang ini tampaknya merupakan kebijakan pemerintah kolonial untuk mencetak kepala-kepala daerah yang memiliki tingkat loyalitas yang tinggi untuk mempertahankan bentuk administrasi pemerintahannya yang bercorak *beamstenstaat* (negara pegawai) di lingkungan lembaga Kepangrehprajaan (Sutherland, 1973). Menurut Sartono Kartodirdjo, struktur kekuasaan dalam sistem politik kolonial bertulangpunggungan birokrasi menurut model sistem tradisional. Ada hirarki



ketat yang menjadi penyalur pemerintah dari atas ke bawah. Pada hakekatnya, mereka sebagai perantara penguasa asing dengan rakyat yang telah ada kontak sejak lama dengan Belanda. Agi pula posisinya sebagai perantara menempatkan para bupati serta bawahannya dalam posisi yang strategis dalam bidang kultural sebagai unsur sosial yang terpaksa melakukan adaptasi terhadap perubahan politik serta nilai-nilainya.

Di satu pihak mereka didorong untuk mempertahankan gaya hidup tradisionalnya berikut seni, sastra, dan filsafatnya; di pihak lain, dalam bidang politik dukungan kekuasaan kolonial sangat memperkuat kedudukannya. Jadi terjadilah enfeodalisasi. Peranan pangreh Paja penuh dengan ambivalensi. Ibaratnya ia berdiri dengan satu kaki dalam alam tradisional dengan paternalisme, dan feodalismenya, dengan kakinya yang lain dalam dunia moderen dengan nilai-nilai baru dalam sistem sosial-politik yang berlaku. Tentu ini menjadi penghambat bagi elit birokrasi pribumi untuk memegang peranan sebagai inovator penuh dalam menghadapi perubahan sosial.

Setelah Indonesia merdeka, kegiatan kerja magang ini tidak jalankan lagi. Oleh karena pada masa itu telah terjadi suatu euforia kebebasan. Semua yang berbau penindasan, feodalisme, diskriminasi ditinggalkan.

Baru pada masa pemerintahan Orde baru, kegiatan kerja magang mulai digalakkan kembali. Kerja magang saat itu bukan mengabdikan secara total yang dimulai dari bawah (sebagai juru tulis) tetapi kerja magang secara profesional. Pemagang tidak melakukan kegiatan di luar profesinya. Biasanya ini terjadi di bidang perindustrian yaitu perusahaan ayau industri kecil melakukan magang di perusahaan besar. Perusahaan kecil sebagai pemagang yang disebut *anak angkat* di perusahaan besar yang disebut *bapak angkat*. Dengan harapan akan bermunculan penguasah-pengusaha besar yang pada akhirnya mereka dapat memperkuat perekonomian negara

Kerja magang ini berkembang semakin luas, bahkan sekarang di lingkungan Perguruan tinggi juga diminta oleh Dikti untuk mengembangkan pendidikan yang mengarah kepada peningkatan kompetensi lulusan. Mahasiswa tidak

hanya dididik untuk menguasai konsep dan teori di bidang ilmunya saja tetapi harus dididik menjadi orang terampil, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menerapkan ilmunya di masyarakat, yaitu melalui matakuliah kerja magang mahasiswa ke instansi/industri terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djajadiningrat, 1919. **Herinneringen van Pangeran Aria Achmad Djajadingrat**. Amsterdam, G. Koff.
- Alkema, B., 1925. **Ons Insulinde**. Haarlem: H..D. Tjeenk Willink.
- Djajahadikusumo, M., 1969. **Herinneringen uit 3 Tjidperken**. Jakarta: Indera.
- Furnifall, J.S., 1914. **Netherlands India, A Study of Plural Economy**. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- Geertz, H. 1961. **The Javanese Family : A Study of Kinschip and Socialization**. N.Y: Free Press of Glencoe.
- Hobbema, J. 1912. *Over de opleiding van Inlandse ambtenaren op Java en Madoera*, dalam majalah **Indische Gids** (ID), Jilid 34, Bagian 2.
- Hoën, H 'r., 1934. *Uit Het Leven van Tirtokoesoemo: Van Magang (Inlandsch Schrijver) tot Regent*, dalam **Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis omtrent Oost- en West Indie**. Tahun ke 7. Amsterdam: J.H. Bussy.
- Overduijn, F.K. 1900. *Benoeming, Promotie en pensioeneering van Inlandsche Ambtenaren op Java en Madoera*, dalam **TBB**, Jilid 19.
- Parkin, Frank. 1982. **Max Weber**. London: Ellis Horwood Ltd.
- Renier, G.J. 1950. **History Its Purpose and Method**. London: Allen & Enwin Ltd.

- Ricklefs, M.C. 1991. **Sejarah Indonesia Modern**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sartono Kartodirdjo, 1990. **Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme**. Jakarta: PT Gramedia.
- Scherer, S.P. 1985. **Keselarasan dan Kesenjangan: Pemikiran Pemikiran Priayi Nasionalis Jawa awal Abad XX**. Jakarta. PT. Sinar Agape Press.
- Sutherland, Heather. 1973. *Note on Java's Regent Families*, dalam majalah **Indonesia**, No. 16-17.
- Wertheim, W.H. 1978. **Indonesie van Vorstenrijk tot Neo-Kolonie**. Amsterdams.